

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A Kusumayati, 2009, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*, UI Press, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- , 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV.Diadit Media, Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Asikin, Amirudin, dan Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum(edisi revisi)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asshidiqie, Jimly, dan M. Ali Safa"at, 2011, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenadamedia, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *"Hukum Administrasi Negara"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bahri, Idik Saeful, 2021, *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, BNHM, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2021, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2015, *Hukum Pidana Materil dan formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- , 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,(edisi revisi)* Rajawali Pers, Depok.
- , *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Edisi Revisi, Jakarta, 2016.
- Chandra, M.Jeffri Arlinandes dan JT Pareke, 2018, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang OJK*, CV Zigie Utama.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Efandi, A'an, dan Freddy Purnomo, 2017, "*Hukum Administrasi*", Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Administarsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elpah, Dani, et all, 2016, *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Elpah, Dani, 2014, *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta.
- Ghazali, Adami, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Media Nusa Creative.
- Girsang, Junifer, 2012, *Abuse of Power – Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M.et. all., 2010, "*Hukum Administrasi dan Good Governance*", Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjha Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana – edisi revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- , 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herniwati, et all, 2020, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada Bandung.
- HR, Ridwan , 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Kedua – Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Premadamedia Grup, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1996, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta.
- , 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara – Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017, *Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus- Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*, KPK, Jakarta.
- , 2016, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*,: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Depok.
- Lotulung, Paulus Effendi, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, 2005, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Muljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2017, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Nazir, M., 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk. 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
- Panjaitan, Marojahan JS, 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang - Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Permana, Tri Cahya Indra, 2014, *Hak Permohonan Pejabat/Badan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press, Yogyakarta.
- , 2016, *“Catatan kritis terhadap perluasan kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara”*, genta, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, H.Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung.
- Riyono, 2021, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan RI*, Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum – Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h. 56. Lihat juga pada C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soesilo R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Suhariyanto, Budi Dan Dani Elpah, 2017, *Titik Singgung Pertanggung Jawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Administrasi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2017, *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum – Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum – Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tiena, Yulies Masriani, 2020 *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke11*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan, 2018, *“Hukum Administrasi Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E. dan Moh.Saleh Djindang, 2020, *“Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”*, Ikctiar Baru, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Lakhsang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

- Wiyono, R, 2020, *Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono, Trisno dan Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya.

UNDANG-UNDANG:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Republik Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 No.77 dan Tambahan Lembaran Negara No.3344.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 No.140 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3874.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4150.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 No.5 dan Tambahan Lembaran Negara No.4355.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 35 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4380.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara No. 4380.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2006 No.85 dan Tambahan Lembaran Negara No.4654.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 155 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5074.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 No.292 dan Tambahan Lembaran Negara No.5601.

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5587.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor.48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Pejabat Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 230, Tambahan Lembaran Negara No. 5943.

JURNAL :

Antoro, Bibianus Hengky Widhi, "Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN", *Jurnal Yudisial*, Vol.13, No.2, Agustus 2020.

AR, Suhariyono, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Arwanto, Bambang, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Tindakan Faktual Pemerintah", *Yuridika*, Volume 31 No. 3 September 2016.

Azhar, Muhamad, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Jurnal NOTARIUS*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Dewi, Arma, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No.1 Tahun 2009.

Efendi, Erdianto, "Tafsir Atas Sifat melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Oleh Pejabat Administerasi Negara Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Al Risalah", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.11 No.2 Desember 2011.

Elfah, Dani, "Titik Singgung Kweenangan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan tipikor dalam menilai terjadinya penyalahgunaan kewenangan", *Puslitbang Hukum dan Peradilan MA*, 2016.

Fathudin. "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)", *Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2015.

Fatkhurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997.

- Haris, Oheo K, "Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan)", *Yuridika*, Vol.30 No.1 Januari 2015.
- Hendrawati, Islamiyati dan Dewi, "Analisis Pendapat Bustanul Arifin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *FH UNDIP*, Semarang, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.2 No.1 Maret 2018.
- Hermansyah, Alfian Dike, "Analisis Keabsahan Proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dalam Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Verstek* Vol.9 No.1 (Januari – April 2021).
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Persero," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 1 Maret 2017.
- Latif, Abdul, "Tafsir Hakim Terhadap Usur Melawan HUKUM Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2010.
- Manao, Disiplin F," Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari segi hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika* vol.2, No.1, (Maret 2018).
- Muhlizi, Arfan Faiz, "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.
- Munaf, Yusri " Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)" *Jurnal Kajian Pemerintahan* Vol.4 No.1 Maret 2018.
- Mustamu, Julista, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan ", *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.
- Nugraha, Satriya, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sociosciantia*, Vol. 8 No. 1 Maret 2016.
- Nurhayati, Ratna,at all, "Pertanggung Jawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.6, No.1, Maret 2017.
- Panjaitan, Marojahan JS, "Penyelesaian Penyalagunaan Wewenang yang menimbulkan kerugian negara menurut hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Universitas Islam Indonesia, Volume 24 Issue 3, Juli 2017.
- Pietersz, Jemmy Jefry , "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang" , *Jurnal SASI* Vol. 23 No. 2, Juli - Desember 2017.
- Prastowo, R.B.Budi, "Delik Formiil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formiil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK Perkara No. 003/PUU-IV/2006", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No.3, Juli 2006.
- Rasul, Sjahrudin, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009.

- Respationo, H.M. Soerya, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013.
- Rini, Nicken Sarwo, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol.18 No. 2, Juni 2018.
- Sahlan, Mohammad, "Kewenangan Peradilan Tipikor pasca berlakunya Undang- Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016
- , "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi", *jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2 Vol.23 April 2016.
- Simanjuntak, Enrico Parulian, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*", Volume 7 Nomor 2, Juli 2018.
- Suhariyanto, Budi, "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalagunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor". *Jurnal Arena Hukum Dan Peradilan* Vol. 7, No. 2, Juli (2018).
- Supriyono, "Terciptanya rasa keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol.XIV, nomor 2 November, 2016.
- Susetio, Wasis, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.
- Susilo, Agus Budi, "Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4, No. 1 Maret (2015).
- Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justitia IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Wibowo, Seno, Ratna Nurhayati, "Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi" , *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Yasin, Muhammad dkk, "Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Jakarta: Universitas Indonesia – *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR), 2017.
- Yulius, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.

MAKALAH :

- Atmasasmita, Romli. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI Ke-62* dengan tema "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi", Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.
- Charity, May Lim," Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang NOMOR 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Makalah, May Lim Charity*.
- Danil, Elwi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Ringkasan Disertasi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2001.
- Effendy, Marwan, Makalah , "Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi ? Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi"
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan", *Seminar Nasional, HUT IKAHI Ke-62*, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015.
- Himpunan "Hasil Rakernas MA RI dengan", *Jajaran Pengadilan Pada 4 (empat) lingkungan Peradilan diseluruh Indonesia Tahun 2007 dan 2008*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan", (Jakarta: *Kemenpan RB*, tanpa tahun)
- Kurniawan, Teguh, "Isu Diskresi dalam Kasus Korupsi Kepala Daerah yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Periode 2004-2010 dan Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", *Disertasi*. (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017).
- Mulyadi, Lilik,"Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Menegai Putusan Pemidanaan" *Artikel, badilum Mahkamah Agung*.
- Nirwanto, Andi, "Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca undang-Undang Administrasi Pemerintahan)". *Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62* di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.
- Wantu, Fence M., "Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata", *Ringkasan Disertasi*, Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta, 2011.

Wicipto, Setiadi, "Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan", *Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan*, Kantor Kementerian PAN, Jakarta, 16 Desember 2004.

Website :

"Direktori Putusan Mahkamah Agung RI"<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2022 jam 17.00.

<https://kbbi.web.id/data> ", dilihat pada 17 Februari 2022, pukul 19.00 WIB.

"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c9f75eed557d/keputusan-hukum-administrasi-negara-terhadap-hukum-pidana-dan-perdata/>," di akses pada tanggal 24 November 2021, Jam 10.00 WIB.

"Reformasi Birokrasi Kemenko PMK," <https://www.kemenkopmk.go.id/RB/PMK>, profil

"Website Hukum Online:<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindakan-pidana-korupsi/> " dikunjungi pada tanggal 24 November 2021 jam 10.00 WIB.

"[https://id.wikipedia.org/wiki/Metode deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi) ", dilihat pada 17 Februari 2022, Pukul 19.00 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan", diakses tanggal 1 Desember 2018, Jam 14.00 WIB.

Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, "Karakter Hukum Sertifikat Hak <http://sertifikattanah.blogspot.com/> ", diakses 12 Ferbruari 2022, Jam 16.00 WIB.

Dian Puji Simatupang, "Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Jam 11.00 WIB.

DianPuji Simatupang, "[https:// www.djkn.kemenkeu.go.id / artikel/baca/11296/ Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html) ", dilihat pada 3 Desember 2021, 20.00 WIB.

Ditjen PP Kemenkumham RI," <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan - Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan", diakses pada hari Selasa tanggal 3 Maret Tahun 2020, Jam 19.00 WIB.

- Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi dan Arti Revolusi Mental," https://nasional.kompas.com/read/Dan.Arti.Revolusi_Mental, diakses 20 Desember 2018, Jam 21.00 WIB.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, "Harmonisasi Hukum, [www. Fauzieyusuf hasibuan. wordpress.com](http://www.fauzieyusufhasibuan.wordpress.com)", diakses pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, Jam 17.00 WIB.
- H. Bailey, Cases, Materials & Commentary on Administrative Law, 4th Edition, London: Sweet & Maxwell Ltd, h. 241. "An act or decesion which is beyond the powers of the actor/decesion-maker is said to be ultra vires, may be regarded as having no legal validity". Diakses pada 20 Maret 2021, Jam 19.00 WIB.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara> di akses pada tanggal 16 Desember 2018, Jam 23.00 WIB.
- Muhammad Ahsan Thamrin, "Kapan Kebijakan dapat Dipidana", <https://www.kejatisulesl.go.id> diakses tanggal 20 Agustus 2020, Jam 09.00 WIB.
- Nurhasan Ismail, "<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>" diakses 15 Feb 2022 12.02 WIB.
- O.C. Madril, "Diskresi atau Korupsi", dalam <https://antikorupsi.org> diupload pada tanggal 11 Agustus 2018, Jam 14.00 WIB.
- Saiful anam and Partners, "Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)", Artikel online <https://www.saplawa.com/?s=detournemen> , diakses pada 9 Desember 2021, Jam 23.00 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Ultimum Remedium," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-lt53b7be52bcf59>, diakses pada hari Selasa tanggal 17 Febuari 2022
- Website "<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi-pengambil-kebijakanpublik-tak-dapat-dipidana>." diakses tanggal 20 November 2018, Jam 21.00 WIB.
- Website Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum,"UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION,2003", <https://idih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCA2003.pdf> , dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021 jam 23.00 WIB.
- Website, "<https://jurnal.hukumonline.com/a/60546f673b3622f2db27af41/asas-presumptio-iustae-causa-dalam-ktun-penundaan-pelaksanaan-ktun-oleh-hakim-peradilan-umum> ", Dilihat Pada 5 Desember 2021, Jam 13.00 WIB.

PUTUSAN HAKIM :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan dalam Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN- MDN.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 14/Pid.Sus /2012/PN.AB. dengan Terdakwa Edi Tri Sukmono, SH. Alias Edi dan Putusan MARI Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR. dengan Terdakwa Amril Daud.

Putusan MARI Nomor 977K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan MARI Nomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1485K/Pid.Sus/2013, tanggal 2 Oktober 2013.

Putusan Hakim Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg, tanggal 11 Juni 2015.

Putusan Hakim Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg, tanggal 11 Juni 2015.

Mahkamah Agung RI, Lampiran Putusan, Perkara Kasasi Pidana Umum, Reg.No. 572/ Pid/2003, Dissenting Opinion, Pendapat Hakim Agung Abdul Rahman Saleh.

Mahkamah Agung, Direktori Putusan (Putusan No. 977 K/PID/2004), h.196-197.

